

**KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM
UMAR IBN KHATTAB DALAM KEHIDUPAN KONTEMPORER**

Kemas Abdul Hai

Pendidikan Agama Islam Universitas Jambi

Email: kemas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan etika politik Umar Ibn Khattab, yang hasilnya bisa dikembangkan bukan hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dapat di amalkan bagi siapapun yang berperan aktif dalam memegang kekuasaan dan membuat kebijakan politik. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang terfokus pada sumber data-data literatur. Memfokuskan pada sejarah tokoh yakni Umar Ibn Khattab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengamalan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena etika tidak semata menjadi acuan kepantasan bagi setiap pengambilan keputusan publik, tetapi juga merupakan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: *Etika; Politik; Umar bin Khattab*

Abstract

This research aims at exploring and describing the political ethics of Umar Ibn Khattab which findings can be developed not only within knowledge and science but also can be practised for everyone who takes active role in running a power and in making political policies. This study emphasises on library research that is a kind of research that focusses on literature data sources. Focussing on the history of a figure, Umar Ibn Khattab, the approach used is historical approach, that is a critical investigation on situation, developments, and past experiences, and to weigh validly and carefully on proof from history taken from historical sources as well as interpretation from the sources mentioned. The results showed that national ethical implementation towards a democratic country has been one of urgent needs, due to the facts that ethics is not only prerequisite for any of public policy taken but also as a guide in living a nation.

Keywords: *Ethics; Politics; Umar bin Khattab*

مستخلص

وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف ووصف الأخلاق السياسية لعمر بن الخطاب والنتائج يمكن تطويرها ليس فقط في العلم ولكن أيضا يمكن أن يقوم بها أي شخص الذي يلعب

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

dورا في السلطة السياسية قانونها. وتركز هذه الدراسة على البحث المكتبي وهو نوع من البحوث التي تركز على البيانات المتعلقة بالموضوع. وتركز هذه الدراسة على سيرة شخصية عمر بن الخطاب، فالمنهج المتبع هو المنهج التاريخي، وهو تحليل نقدي على الظروف، والتنمية، والخبرة شمولية بما فيه من صحة الدليل و المصادر التاريخية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة الأخلاق في حياة الأمة أن الديمقراطية أصبحت شديد الحاجة. لأن الأخلاق ليست مجرد إشارة إلى مدى ملاءمة أي صنع القرارات العامة، ولكن أيضا أصبحت توجيهها في حياة الأمة.

الكلمة الرئيسية: الأخلاق; السياسة; عمر بن الخطاب

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah Islam persoalan politik merupakan persoalan yang sangat menonjol terjadi dalam setiap fase perkembangannya, baik pada masa awal kelahirannya maupun di masa modern kontemporer sekarang ini. Hal ini terbukti pada masa awal Islam persoalan yang timbul bukan persoalan keyakinan (teologi) tetapi persoalan politik.¹ Bahkan ketika wafatnya Nabi Muhammad saw. belum sempat Rasulullah dimakamkan umat Islam sudah berkonflik dan hampir terjadi perang antar suku tentang siapa yang pantas menggantikan dalam pemimpin negara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw.

Umar ibn Khattab adalah khalifah yang eksistensi politiknya sangat cemerlang diantara khalifah lainnya. Dikarenakan menurut Musthafa Murad, Umar berperan besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam di kemudian hari, utamanya pembentukan hukum dan aturan Islam, juga penaklukan dan penyebaran ajaran Islam hingga ke negeri-negeri yang jauh.² Sehingga seorang penulis non muslim Michael H. Hart dalam bukunya yang berjudul: 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa, menempatkan Umar salah satu dari tokoh yang berpengaruh tersebut.³

H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, menyebutkan, bahwa Umar Ibn Khattab, khalifah II adalah salah seorang dari tokoh-

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), 92.

² Musthafa Murad, Musthafa Murad, *Kisah Umar Ibn Khattab*, Cet. I, (Jakarta: Zaman, 2009), 29-30.

³ Lihat: Michael H. Hart, *100 A Ranking of The Most Influential Person in History*, (terj) *100 Orang Paling Berpengaruh Di Dunia Sepanjang Masa*, cet. I (Jakarta: Hikmah, 2009).

tokoh terbesar pada permulaan Islam dan pendiri imprium Arab.⁴ Maka sangatlah wajar kalau sekiranya Umar Ibn Khattab ini adalah tokoh yang menjadi inspirasi banyak penulis sejarah. Apalagi situasi politik zaman sekarang ini menurut Abbas Mahmoud al-Aqqad, masa yang sangat berkembang mengedepankan kekuatan yang semena-mena dan mereka yang mendukungnya berusaha untuk mendakwakan pemahaman itu.⁵ Maka itu perpolitikan Umar Ibn Khattab sangat cocok untuk dicontoh sebagai solusi dalam distorsinya etika dan politik pada masa kini. Karena Umar sudah memberikan contoh dalam menghancurkan sistem kekuatan semena-mena dari akar-akarnya.⁶

Dengan latar belakang pemikiran di atas, maka tulisan ini secara mendalam mencoba untuk mengkaji dua hal. *Pertama*, Bagaimana Konsep Etika Politik Umar Ibn Khattab, *kedua*, Sejauh mana urgensi etika politik Umar Ibn Khattab dalam tata politik masa kini.

Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang terfokus pada sumber data-data literatur.⁷ Memfokuskan pada sejarah tokoh yakni etika politik Umar Ibn Khattab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.⁸

B. Pembahasan

1. Umar Ibn Khattab Diangkat Menjadi Khalifah

Sehari setelah jasad Abu Bakar dikuburkan pada bulan Jumadits Tsani tahun 13 H atau pada hari wafatnya Abu Bakar pada selasa, 22 Jumadits Tsani.⁹ Atau 22 Agustus 832 M.¹⁰ Sebelum sholat zuhur Umar resmi di bai'at di Masjid menjadi khalifah yang ke dua. Setelah sebelumnya dalam keadaan sakit yang sudah payah

⁴ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Rajawali, 1991), 1.

⁵ Abbas Mahmoud al-Aqqad, *Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 11.

⁶ Musthafa Murad, *Kisah Umar Ibn Khattab...*, 11.

⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 113.

⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55-56.

⁹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafah...*, 132.

¹⁰ Muhammad Husain Haekal, *Umar Ibn Khattab* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), 90.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Abu Bakar bermusyawarah bersama para sahabat seperti Abdur-Rahman bin Auf, Usman bin Affan, Sa'id bin Zaid, Usaid bin Hudair dan juga secara umum mendatangi orang-orang di masjid untuk menyetujui keberadaan Umar Ibn Khattab pengganti beliau sebagai khalifah selanjutnya.¹¹

Setelah diangkat sebagai khalifah Umar bin Khattab menyebut dirinya "*Khalifah khalifati Rasulillah*" (pengganti dari pengganti Rasulullah). Ia juga mendapat gelar *Amir Al-Mukminin* (komandan orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya.¹²

2. Bentuk-Bentuk Etika Politik Umar Ibn Khattab

Politik Umar adalah politik Arab dengan tujuan memasukkan semua ras Arab yang terbentang dari Samudera Indonesia sampai ke utara Irak dan Syam dalam satu kesatuan di bawah kekuasaan Semenanjung Arab, bahkan di bawah kekuasaan Madinah.¹³

Pola politik Umar tidak terlepas dari landasan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber rujukan dan *pengaruh* sosok pendahulunya yaitu Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar. Keberadaan kedua tokoh ini bukan sekedar sahabat senasib dan seperjuangan, tetapi juga guru dan sumber keteladanan dalam menjalani kehidupan. Ketaatan dan keteguhan dalam menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber rujukan tidak membatasi dan mengekang diri dari improvisasi pemikiran dan kebijakan yang inovatif pada diri Umar. Keberanian Umar dalam menentukan kebijakan hukum dan ketatanegaraan menunjukkan kedalaman ilmu dan pemahamannya terhadap al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw..

Kecintaan dan keteladanannya kepada kedua tokoh tersebut tidak mengukung kecerdasan dan ketegasannya dalam mengambil sikap. Walau tidak jarang sikap dan pemikirannya itu bersebrangan dengan kedua pendahulunya itu. Seperti kasus tawanan perang Badar. Nabi dan Abu Bakar sependapat agar tawanan itu menebus diri dengan apa yang mereka miliki. Sedangkan Umar mengusulkan agar mereka dibunuh semuanya. Namun pendapat Umar inilah yang dilegitimasi oleh al-Qur'an.¹⁴

Keberanian Umar untuk berijtihad juga merupakan faktor yang banyak membuat perubahan dan kemajuan dalam perkembangan Islam, baik sebelum masa

¹¹ Muhammad Husain Haikal, *Umar Ibn Khattab*, 88- 89.

¹² Mun'im Majeed, *Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah* (Mesir: Angelo, 1965), 28.

¹³ Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khattab*, 250.

¹⁴ Musthafa Murad, *Umar ibn Khattab, (Ter), Kisah Umar Ibn Khattab...*, 36-37.

kepemimpinannya maupun ketika pada masa ia memimpin. Ini menunjukkan bahwa Umar adalah sosok kepemimpinan yang mempunyai *mainsade* tersendiri dalam setiap pemikiran dan kebijakannya dalam memimpin kemajuan Islam. Keberanian serta kecerdasannya telah menjadi inspirasi bukan saja para ilmuwan sejarah Islam tetapi para ilmuwan Barat pun tidak sedikit memuji kemampuan Umar dalam membangun politik Islam sehingga terkenal dan disegani oleh imperium-imperium yang besar pada waktu itu.

Adapun bentuk-bentuk etika politik Umar Ibn Khattab yang akan dianalisis dalam artikel ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Keadilan

Secara bahasa "*adl*" dapat diartikan "sama". Persamaan merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian ia melakukan yang patut lagi tidak sewenang-wenang.¹⁵

Dari pemaknaan adil diatas maka akan dilihat sejauh mana perpolitikan Umar sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Trutama dalam kebijakan politik dan penggunaan kekuasaan. Karena kekuasaan itu cenderung untuk bersikap sewenang-wenang dan penyimpangan.

Keadilan adalah inti tugas suci kekuasaan Umar. Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Kekhalifahan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tiada istana atau pakaian kebesaran, baik untuk Umar sendiri maupun bawahannya sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, dan mereka setiap waktu dapat dihubungi oleh rakyat.¹⁶

Dalam menerapkan keadilan Umar sangat keras dan tegas, bahkan tidak saja kepada orang lain tetapi ia pun menjadi bagian dalam keadilan itu. Dari ungapannya yang sangat mengagumkan ia mengatakan:

"Bagaimana saya akan dapat memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan."¹⁷

¹⁵ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 111

¹⁶ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: AMZA, 2009), 103.

¹⁷ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab*, 363

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Makanya ia tidak segan menurunkan taraf hidupnya ke tingkat hidup orang-orang miskin yang makan hanya dari hidangan yang tersedia duduk bersama-sama dengan ribuan orang kelaparan untuk sekedar menyambung hidup.

Ketika ia baru diangkat menjadi khalifah dalam pidato politiknya Umar menjanjikan untuk bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dalam pidatonya ia mengatakan: "Di mata saya, tidak ada dari kalian orang yang lebih kuat dari orang yang lebih lemah diantara kalian, sebelum saya berikan haknya, dan tak ada orang yang lebih lemah dari orang yang kuat sebelum saya cabut haknya".

Dalam kesempatan lain Umar juga pernah berpidato mengatakan: "Saya tidak pernah mengangkat pejabat-pejabat untuk menghilangkan kesenangan kalian, untuk mencemarkan kehormatan dan untuk mengambil harta kalian. Tetapi saya mengangkat mereka untuk mengajarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Barang siapa diperlakukan tidak adil saya tak akan mengizinkannya menyampaikan pengaduan kepada saya sebelum saya menjatuhkan hukuman yang setimpal."¹⁸

Meskipun berwatak keras dalam menetapkan dalam menyelesaikan perkara sangat hati-hati karena rasa takut kepada Allah. Jika ada dua orang yang berselisih datang, ia berlutut sambil berkata: Ya Allah, bimbinglah aku dalam menghadapi dua orang itu, karena mereka masing-masing ingin melihatku dari segi agamaku."¹⁹

Sikap Umar yang tegas dan hati-hati itu juga diakui oleh Amr ibn Ash, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang setelah Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar yang lebih takut kepada Allah selain Umar. Ia tidak pandang bulu ketika menegakkan kebenaran, baik pada anak maupun orang tua."²⁰

Betapa kerasnya Umar dalam berpegang pada keadilan, dan mengenai persamaan antara sesama manusia, dilukiskan dalam kata-katanya ini: "Kalau ada dua orang yang berselisih mengadu kepadaku, untuk menentukan pihak mana yang benar aku tak pandang bulu."²¹

Sikap keras dan tegas Umar bukan saja kepada orang lain tetapi juga kepada keluarganya sendiri. Bahkan kalau ia ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, terlebih dahulu ia menemui keluarganya dengan mengatakan: "Kalau ada salah

¹⁸ *Ibid.*, 656

¹⁹ *Ibid.*, 658

²⁰ Musthafa Murad, 'Umar ibn Khattab...', 169.

²¹ Muhammad Husain Haekal, 660.

seorang yang melakukan sesuatu yang saya larang, niscaya hukumannya saya lipat gandakan.”²²

Sikap ini pernah dibuktikannya terhadap anaknya sendiri yang bernama Abdur-Rahman. Anaknya di Mesir minum-minum sampai mabuk bersama Abu Sarwa'ah. Meskipun mereka sudah dihukum oleh Gubernur Amr bin Ash dengan pukulan dan dicukur kepalanya di dalam rumah. Namun Umar menganggap itu masih tidak adil karena tidak dihukum sebagaimana mestinya yaitu di depan umum. Maka itu Umar mengirim surat kepada Amr bin Ash yang berisi kemarahan kepada Amr bin Ash karena sudah melanggar perintah khalifah yaitu memperlakukan hukuman kepada anaknya tidak seperti kaum Muslimin yang lain. Maka Umar memerintahkan kepada Amr bin Ash untuk mengirim anaknya dalam pakaian lurik dengan menunggang unta, supaya perbuatan yang buruknya itu diketahui orang. Yang kedua kalinya Umar kembali menghukum Abdurrahman, anaknya untuk menjalankan pukulan dan dipenjarakan. sampai kemudian ia meninggal.²³

Dalam menjalankan keadilan ia juga tidak membedakan antara ningrat dengan jelata, antara pejabat tinggi dengan rakyat biasa. Kasus Muhammad bin Amr bin Ash adalah contoh keadilan Umar. Suatu ketika Muhammad bin Amr bin Ash pernah mencambuk seorang orang Mesir sambil berkata: Terimalah ini; aku adalah anak keturunan orang-orang mulia. Oleh Amr orang Mesir itu dipenjarakan karena dikawatirkan akan mengadu kepada *Amirulmukminin*. Orang itu melarikan diri dari penjara dan pergi ke Madinah mengadukan halnya kepada Umar. Oleh Umar, Amr dan Anaknya dipanggil dari Mesir dan dihadapkan ke *majlis qisas* (sidang pengadilan pidana), dan setelah mereka tampil Umar menyuruh orang Mesir itu untuk mencambuk anak dari Amr bin Ash tersebut. Muhammad dicambuk oleh orang Mesir sampai kepayahan. Setelah selesai orang tersebut hendak mengembalikan cambuk itu kepada *Amirulmukminin* ia berkata: ”Putarkan cambuk itu diatas kepala Amr yang botak; berkat kedudukannya itulah anaknya berani memukul Anda!” dan kemudian sambil menoleh kepada Amr dengan sikapnya yang marah Umar berkata: ”Amr! Sejak kapan Anda memperbudak orang, padahal ibunya melahirkannya sebagai orang yang merdeka!”²⁴

²² *Ibid.*, 658

²³ *Ibid.*, 658-659

²⁴ *Ibid.*, 659-660.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Pada kasus lain juga yang menggambarkan sikap Umar tidak membedakan orang lain dari kedudukannya. Ibn Abbas menuturkan: Selepas menunaikan ibadah haji, Umar datang kepada kami. kemudian Shafwan ibn Umayyah membuatkan makanan. Beberapa pembantu Shafwan datang membawa makanan dengan nampan besar yang dihidangkan untuk Umar dan tamu lainnya. Orang-orang menikmati hidangan tersebut, sementara para pelayan hanya berdiri. Umar berkata, "Aku melihat para pelayanmu tidak ikut makan. Apakah kalian tidak menyukai mereka?" Sufyan ibn Abdullah menjawab, "Demi Allah tidak, wahai Amirul Mukminin, tetapi kita mempunyai hak atas mereka." Mendengar hal tersebut, Umar berang, "Tidaklah patut bagi sebuah kaum memperlakukan pelayan mereka dengan sewenang-wenang." Umar pun mengajak para pelayan untuk duduk dan makan bersama mereka. Sementara Umar tidak ikut bersantap.²⁵

Selain itu Umar juga tidak membedakan sikap keadilannya karena faktor perbedaan agama. Seorang kakek Yahudi pernah mendatangi Umar meminta jizyah. Lalu Umar memegang tangannya dan membawa kerumahnya, lalu diberi apa yang dibutuhkannya pada saat itu dan mengirimnya kepada pengurus Baitul Mal, dan memerintahkan: "Perhatikanlah orang ini dan orang-orang seperti dia. Demi Allah, tidaklah kita berlaku adil sekiranya kita memanfaatkan masa mudanya kemudian kita menyia-nyiakannya di hari tuanya."²⁶

Pada masa pemerintahan Umar, ia pernah bertemu pembunuh saudaranya yang bernama Zaid ibn Khattab dalam perang Yamamah. Pembunuhnya itu akhirnya memeluk Islam. Ketika ia bertemu pembunuh saudaranya itu Umar berkata, "Bisakah kau palingkan wajahmu dariku? Aku tidak menyukaimu." Laki itu menjawab, "Apakah ketidak sukaanmu kepadaku akan mempengaruhi hak-hakku sebagai rakyatmu dan sebagai muslim?" "Tidak," tegas Umar.²⁷

Sikap kerasnya kepada keluarga, kepada para pejabat dan keluarga mereka karena keyakinannya bahwa untuk menjamin adanya kebebasan, kekuatan, dan kehormatan umat hanyalah dengan mempersamakan antara si penguasa dengan rakyatnya, antara si kaya dengan si miskin, antara sang *amir* dengan sijelata.

Baginya, kedudukan para pejabat itu terhadap dia sama dengan kedudukan rakyat kepada para pejabat. Dia bertanggung jawab kepada mereka, sama seperti

²⁵ Musthafa Murad, 'Umar ibn Khattab, 188

²⁶ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Kecemerlangan. ...*,55

²⁷ Musthafa Murad, 'Umar ibn Khattab...., 188

para pejabat bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi bawahan mereka. Jika mereka berlaku seweng-wenang terhadap rakyat, mereka juga harus dihukum sama seperti yang berlaku terhadap siapa saja yang berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain di negeri itu. Ia pernah mengungkapkan perasaannya mengenai tanggung jawab itu dengan mengatakan: "Siapa pun pejabat yang merugikan orang lain dan tindakannya itu sudah disampaikan kepadaku tetapi aku tidak dapat mengubahnya, maka akulah yang merugikan orang itu."²⁸

Sikap adil dalam memimpin umat pada diri Umar ini merupakan sifat warisan yang sudah tertanam dan terlatih dari kecil sebelum ia masuk Islam. Pada masa itu Umar mudah sudah dipercaya oleh sukunya Bani 'Adi memegang jabatan sebagai duta kaumnya dan mengurus pengadilan di masa jahiliyah.²⁹

Dari uraian diatas tegambar kekuasaan yang besar yang dimiliki Umar tidak membuat ia sewenang-wenang terhadap rakyat dan bawahannya. Bahkan setiap kebijakannya menunjukkan sosok Umar adalah orang yang sangat cinta akan keadilan. Karena ia menjadikan dirinya contoh dari pada sikap keadilannya itu. Kecintaannya pada keadilan itu, terkadang harus mengorbankan dirinya dan keluarganya. Karena memang keadilan itu tidak boleh memihak kecuali hanya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ini pulalah yang membuat Umar sangat dekat di hati rakyat dan dikagumi dan disegani bukan saja kawan tetapi juga lawan. Kebijakan Umar dalam menerapkan keadilan bukan saja sekedar lahir dari kesadaran spiritual nya yang tinggi, tetapi juga bentuk kecerdasan ia dalam memahami ajaran Islam.

Sifat tegas dalam segala hal yang diterapkan Umar dalam kepemimpinannya membuat ia tidak pandang bulu dalam menerapkan kebenaran. Bawahannya, golongannya (suku), bahkan anak keluarganya merasakan bagaimana ketegasan Umar dalam menerapkan hukum dan ekonomi yang merata.

b. Aspek Demokrasi

Bicara demokrasi pada diri Umar tentu akan terkesan kontra apabila kita melihat dari sisi sifat dan sikap Umar yang sangat keras dan tegas. Namun intelektualitas dan semangat spiritual yang sangat tinggi itulah membuat sifat keras

²⁸ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab...*,660.

²⁹ Abbas Mahmoud al-Aqqad, *Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 37.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

dan tegas itu menjadi nilai lebih dan potensi positif pada diri Umar dibandingkan dengan khalifah-khalifah dan sahabat-sahabat yang lain.

Karena sikap dan sifatnya yang keras itulah terkadang kebijakan dan keputusannya sering diluar logika demokrasi, terkesan seorang pemimpin yang tidak punya belas kasihan dan otoriter. Seperti misalnya pemecatan yang dilakukan Umar terhadap panglima perang Islam Khalid bin Walid. Padahal sosok Khalid adalah panglima yang sangat disegani musuh dan dikagumi oleh Umat Islam karena keberhasilannya dalam setiap perang yang dipimpinnya.

Kalau kita lihat sejarah dan peristiwa demi peristiwa pada masa kepemimpinannya, kekaguman dan pujian akan mengalir dari kesadaran kita betapa Umar benar-benar memahami hakikat ajaran Islam yang sangat demokratis yaitu menekankan musyawarah dan kebebasan berpendapat dalam setiap memutuskan persolaan.

Dengan musyawarah itulah, sifat Umar yang sangat keras namun kekuasaannya tidak menjatuhkan dirinya pada sikap kezoliman dan kesewenang-wenangan. Umar pernah berpendapat bahwa sifat keras atau kewibawaan merupakan sarana untuk menegakkan kebenaran, dan tidak boleh dieksploitasi dalam menzalimi rakyat. Itulah sebabnya ketika seseorang Quraisy bertemu dengannya lalu berkata agar Umar bersikap lemah lembut kepadanya. Sebab hati mereka penuh ketakutan. Maka ditanya oleh Umar "Apakah dalam sikap (kerasku) itu terdapat kezhaliman?" Quraisy itu menjawab, "Tidak." Umar berkata, :Itulah sebabnya maka Allah menambahkan di dalam dadamu rasa takut kepadaku."³⁰

Hal ini dapat terjaga karena dalam memimpin Umar selalu bermusyawarah dengan para bawahannya sebelum memutuskan setiap kebijakan yang akan ia tetapkan. Dalam teori demokrasi disebutkan bahwa partisipasi merupakan elemen terpenting dalam berdemokrasi.³¹

Tuntutan akan partisipasi ini berlandaskan suatu alasan bahwa seorang dapat merealisasikan potensinya sebagai manusia secara penuh hanya dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan negara, sehingga tersedia berbagai alternatif cara untuk mengekspresikannya dalam istilah yang jelas.³²

³⁰ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab* (Jakarta: Khalifah, 2006), 23.

³¹ Varma, S.P, *Teori Politik Modern*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali, 1990), 49.

³² Varma, S.P, *Teori Politik Modern...*,49.

Umar dianggap peletak dasar suatu negara yang demokratis. Ia membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna tanpa memperoleh contoh pola sebelumnya.³³

Demokrasi Umar memiliki kekhasan yang tersendiri. kekhasan itu adalah demokrasi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber acuan. Dimana prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam terwujud dalam nilai-nilai musyawarah yang disebutkan dalam al-Quran (QS. 42:38 dan QS. 3:159).

Di sinilah akan terlihat urgensi musyawarah itu dalam menetapkan setiap kebijakan politik. Dengan musyawarah, potensi-potensi hegemoni pihak-pihak kuat atas pihak yang lemah menjadi tereleminir. Sebab, dalam musyawarah, dibuka pintu partisipasi aktif seluruh umat dengan posisi dan kedudukan yang sama.³⁴

Walaupun istilah demokrasi sering dianalogikan dengan istilah *al-syura* dalam Islam.³⁵ *Syura* dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas. Menurut Ahmad Kamal Abu Al-Majad yang dikutip oleh Quraisy Shihab, pendapat mayoritas itu setelah dilakukan beberapa kali musyawarah sampai mendapatkan kesepakatan. Dan dalam musyawarah itu juga dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan.³⁶

Demokrasi Islam (*syura*) itu bukan sekedar suara mayoritas saja yang menjadi pertimbangan, tetapi dalam musyawarah itu bila tidak mendapatkan kemufakatan maka pertimbangannya adalah pilihlah yang lebih banyak sisi baiknya atau yang paling sedikit sisi buruknya. Hal lain juga yang membedakan demokrasi dengan *syura* adalah tidak semua urusan manusia itu bisa diputuskan bersama/musyawarah. Seperti sesuatu yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, dan tidak benarkan pula menetapkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.³⁷

Dalam uraian ini akan menggambarkan nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam kepemimpinan Umar ibn Khatthab selama sepuluh tahun. Umar mempunyai kepribadian yang sangat kuat sekali yaitu ketegasan, keras dan luwes. sifatnya yang sangat kasih sayang kepada umatnya tetapi tidak membuat dirinya menjadi lemah.

³³ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya...*, 156.

³⁴ Faisal Baasir, *Etika Politik, Pandangan Seorang Politisi Muslim...*, 146-147.

³⁵ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, 452

³⁶ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, 45

³⁷ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I ...*, 452.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Ketegasannya dan kekerasannya dalam bersikap tidak membuat rakyatnya menjadi terzolimi, bahkan sangking kerasnya dalam menjalankan pemerintahan, Umar pernah diminta dari beberapa tokoh sahabat Ali, Usman, Talhah, Zubair, dan Sa'ad agar sedikit longgar dan bersikap lunak. Permintaan itu dijawab oleh Umar: "Saya sudah bersikap longgar kepada semua orang sampai karena sikap itu saya takut kepada Allah; kemudian saya bersikap keras sehingga saya takut kepada Allah karena sikap saya yang keras itu. Bagaimana jalan keluarnya?!"

Mendengar jawaban Umar seperti itu Abdurrahman keluar sambil menangis dan berkata: Celakalah mereka yang sesudahmu!³⁸

Meskipun Umar pemimpin yang utama tetapi ia selalu bermusyawarah meminta pendapat dari para sahabat sebelum memutuskan persoalan negara. Suatu ketika Umar dalam perjalanan ke Syam, dan pemimpin-pemimpin meliter menemuinya dengan mengatakan bahwa daerah itu sedang dilanda wabah penyakit yang hebat. Ia mengumpulkan mereka dan diajaknya mereka bermusyawarah: Akan meneruskan perjalanannya ke Syam yang sedang dijangkiti wabah atukah harus kembali ke Madinah? Ternyata mereka saling berbeda pendapat: Ada yang menyarankan agar meneruskan perjalanan, yang lain berpendapat lebih baik kembali. Akhirnya Umar dan rombongan mengikuti pendapat untuk kembali ke Madinah.³⁹

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa lima ratus ribu dirham. Dengan uang sebanyak itu ada sahabat yang mengusulkan kepada Umar untuk membentuk lembaga keuangan. Namun Umar tidak memutuskannya langsung tetapi ia mengajak sahabat untuk bermusyawara. Satu-satu sahabat diminta pendapatnya tentang hal ini. Ali bin Abi Talib menyarankan agar uang yang sudah terkumpul setiap tahun dibagikan dan jangan tersisah. Sedangkan Usman berpendapat agar terhindar dari kekacauan dan kekisruhan maka ia mengusulkan orang-orang yang mendapatkan uang tersebut harus dicatat, agar mengetahui siapa yang sudah dan siapa yang belum mendapatkan. Karena banyaknya uang dan orang yang akan dibagikan. Tetapi Walid bin Hisyam bin al-Mugirah menyarankan: agar Amirul Mukminin, mencontoh para raja di negeri Syam yaitu membentuk lembaga keuangan dan memobilisasi tentara. Akhirnya pendapat ini yang diterima Umar.⁴⁰

³⁸ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab...*, 661.

³⁹ *Ibid.*, 647

⁴⁰ *Ibid.*, 673.

Umar juga pernah mengajak para sahabat untuk bermusyawarah sesudah terbunuhnya Abu Ubaid di Irak. Umar meminta pendapat mereka apa yang harus dilakukannya. pendapat umum mengatakan agar Umar berangkat dan membawa serta mereka. Tetapi staf khususnya berpendapat cukup mengirim salah seorang sahabat Rasulullah memimpin pasukan ke Irak, dan dia sendiri tinggal di Madinah memasok orang itu. Ketika itu ia mengumpulkan orang dan berkata kepada mereka: "Kaum Muslimin berhak mengadakan musyawarah diantara sesama mereka. Salah sendiri tak lebih hanya salah seorang dari kalian, sebelum kalangan pemikir itu membebaskan saya dari ikut pergi. Oleh karena itu saya berpendapat akan tetap tinggal dan akan mengirim orang saja."⁴¹

Pada suatu malam Umar mendatangi Abdurrahman bin Auf mengajak untuk patroli ke pasar karena ada orang yang dicurigai untuk mencuri. Sesampai di pasar mereka melihat ada penerangan lampu. Umar melarang adanya penerangan lampu sesudah orang tidur. Ketika mereka pergi ke tempat tersebut, ada kelompok orang yang sedang minum-minum, yang salah seorang diantaranya ada yang dikenalnya. Paginya orang itu dipanggil dan katanya: "Anda dan teman-teman Anda semalam sedang minum-minum. Siapa yang memberitahukan Anda, Amirulmukminin?"

Saya lihat sendiri kata Umar.

Bukankah Allah sudah melarang memata-matai orang?

Orang itu ditinggalkan oleh Umar.⁴²

Kisah ini menunjukkan ketidak sewenag-wenangan dan arogan Umar kepada rakyatnya, dia mau menerima protes dari rakyatnya dan pergi meninggalkannya karena kebenaran yang ada pada orang lain.

Umar juga sangat menghormati keputusan hukum walau keputusan itu tidak berpihak dan memenangkan beliau. Umar pernah menawar seekor kuda dari seseorang kemudian ia menaikinya, tetapi begitu dicoba kuda itu sudah kehabisan tenaga. Ia bermaksud mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya tetapi pemilik kuda itu menolak. Kalau begitu harus ada orang yang dapat menengahi antara kita ini, kata Umar. Orang itu berkata: Syuraih orang Irak itu. Maka perkara itu diserahkan kepada Syuraih. Sesudah mendengarkan argumen kedua pihak

⁴¹*Ibid.*, 647.

⁴²*Ibid.*, 657.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Syuraih berkata: *Amirulmukminin*, Ambillah yang sudah Anda beli, atau kembalikan seperti waktu Anda ambil. Kata Umar: Keputusannya hanya begini!?"⁴³

Dari kisah-kisah di atas terlihat bahwa ketegasan dan kerasnya Umar dalam memimpin umat Islam, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai demokratis dalam jiwa dan kepemimpinannya dan kekuasaan yang ia miliki tidak membuat Umar bersikap sewenang-wenang kepada bawahannya dan rakyatnya. Selain ia pemimpin tertinggi umat Islam dan penguasa utama Jazirah Arab, tetapi ia tidak pernah memutuskan persoalan negara dan politik sebelum bermusyawarah dengan para staf bawahannya. Bahkan ia juga tidak segan untuk mengajak masyarakat umum untuk ikut berpendapat terhadap suatu persoalan negara.

Yang lebih menakjubkan lagi kekuasaan yang dimiliki Umar tidak membuat ia sewenang-wenang dan bersikap zalim kepada rakyatnya walaupun terkadang persoalan itu tidak mengenai juga bagi dia.

c. Aspek Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)

Umar adalah sosok pemimpin yang hidup dalam kesederhanaan. Meskipun penaklukan yang sudah begitu luas, sedikitpun tidak merubah kesederhanaan kehidupannya, dan pandangannya bahwa dunia ini remeh sudah menjadi tuntutan imannya. Dalam permulaan tugasnya sebagai Khalifah, kaum Muslimin sudah menentukan haknya dari baitulmal, yakni sekedar cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya, seperti yang sudah ditentukan juga untuk Abu Bakar.

Rampasan perang datang melimpah ke Madinah, yang diperoleh Umar tidak lebih yang juga diperoleh orang lain dari kalagan Muslimin. Dia tidak melihat bahwa sebagai Khalifah ia harus mendapat hak melebihi hak yang lain. Suatu hari ia ditanya, dari harta Allah apa yang dibolehkan untuk dia, ia menjawab:

"Yang dianggap boleh dari harta itu buat saya dua pasang pakaian: sepasang untuk musim dingin dan sepasang untuk musim panas; yang saya makan dan dimakan keluarga, seperti yang biasa dimakan keluarga Quraisy, bukan dari yang terkaya, juga bukan dari yang termiskin. Disamping itu saya adalah sama dengan Muslimin yang lain, yang saya peroleh sama dengan yang mereka peroleh."⁴⁴

Selama memimpin sebagai *Amirul Mukminin*, Umar tidak mempunyai Istana yang megah sebagaimana raja-raja dan penguasa pada umumnya. Masjid adalah tahta Umar dalam memimpin umat, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar.

⁴³ *Ibid.*, 668.

⁴⁴ *Ibid.*, 653.

KEMAS ABDUL HAI

Kesederhanaan Umar terlihat ketika tentara Islam yang dipimpin oleh Anas bin Malik dan Ahnaf bin Qois berhasil menangkap raja persia yang bernama Hormuzan dan membawanya untuk menghadap Umar dengan berpakaian lengkap dari sutera bertahtakan emas serta mahkotanya dikepala yang juga bertahtakan mutiara dan permata berlian, ditangannya sebatang tongkat dari emas murni berhiaskan yakut dan mutiara. Ketika sampai di Madinah mereka langsung menuju ketempat kediaman Umar. Tetapi mereka diberitahu bahwa Umar pergi ke Masjid. Merekapun berangkat ke Masjid dan menemukan Umar sedang tidur di beranda kanan Masjid dengan menggunakan mantelnya sebagai bantal. Ketika itu Hormuzaman bertanya: Di mana Umar? Mereka menjawab sambil menujuk kepada orang yang sedang tidur itu. Kemudian ia bertanya kembali: mana pengawalanya, mana pengiringnya? Mereka menjawab tanpa pengawal, tanpa pengiring, tanpa sekretaris dan tanpa ruang istana. Hormuzaman bertambah heran dan berkata kepada orang-orang disekitarnya: "Pantasnya ia seorang nabi, atau sekurang-kurangnya menjalankan tugas para nabi."⁴⁵ Kesederhanaan Umar itulah yang akhirnya membuat Hormuzan menyatakan keislamannya.

Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya keadaan Masjid itu tetap seperti ketika dibangun oleh Rasulullah, dindingnya yang lunak dan atapnya dari daun kurma. Sebenarnya ketika itu Umar sudah mampu membongkar dan membangunnya kembali dengan kemewahan. Barulah pada tahun keempat kepemimpinannya dilakukan pembangunan terhadap Masjid tersebut. Itupun dilakukan dengan faktor semakin banyaknya penduduk Madinah sehingga tidak mampu lagi menampung jamaah. Alasan lain Umar mengatakan: "Kalau tidak karena saya mendengar Rasulullah mengatakan, "Layak kita memperluas Masjid kita ini," niscaya tidak akan saya perluas."⁴⁶

Setiap Umar mengangkat pejabat yang pertama kali diperhatikannya adalah kebersihan para pejabat itu. Karenanya semua pejabat sebelum memangku jabatan kekayaan mereka dihitung. Kalau sesudah itu mereka memiliki kelebihan, maka kebersihan pejabat demikian patut diragukan. Segera diadakan pemeriksaan atas kekayaan mereka. Adakalanya kekayaan itu dirampas, dengan mengatakan kepada mereka: Kami mengirimkan kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang!

⁴⁵ *Ibid.*, 400-401.

⁴⁶ *Ibid.*, 652.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Misalnya Umar pernah memecat Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah cuma dikarenakan ada sekelompok orang dari penduduk kota itu marah kepadanya dan mengadu kepada Umar, bahwa ia tidak melakukan pembagian secara merata dan tidak berlaku adil kepada rakyat.⁴⁷

Umar menggunakan seluruh kekayaan negara untuk kepentingan rakyat dan negara. Tidak pernah sedikit pun untuk mengambil bagian dari harta tersebut, apalagi memanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Suatu hari Umar jatuh sakit. Rakyatnya menganjurkan agar ia meminum madu dari gudang bendahara baitul mal yang menyimpan banyak madu. Namun Umar menolaknya karena belum minta izin kepada rakyat, pemilik gudang tersebut. Ketika orang-orang berkumpul di Masjid, Umar menaiki mimbar. Ia meminta izin kepada khalayak untuk mengambil sedikit madu dari gudang negara.⁴⁸

Ketika Umar membentuk lembaga keuangan negara, ia memanggil Aqil bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal dan Jubair bin Mut'im menyuruh kepada mereka untuk mencatat orang-orang yang akan diberi tunjangan menurut urutan kedudukan mereka. Mereka pun menulis dengan dimulai dari Banu Hasyim, kemudian Banu Taim dari kabilah Abu Bakar, Banu Adi dari kabilah Umar. Setelah Banu Adi tahu dengan ketetapan itu, mereka mendatangi Umar dan berkata: Anda pengganti Rasulullah; mengapa tidak menempatkan diri Anda seperti yang sudah Anda kerjakan! Umar menatap marah kepada mereka sambil menjawab: Hebat, hebat sekali Banu Adi! Kalian mau menjadi beban bagi saya dan mau menghilangkan semua kebaikan saya kepada kalian! Tidak, sampai nanti ada panggilan untuk kalian, dan letakkanlah pada urutan terakhir dalam catatan itu!⁴⁹

Dalam suratnya kepada Huzaifah di Usfan, Umar menuliskan tentang harta rampasan. Umar menulis: "Itu adalah harta rampasan perang yang dilimpahkan Allah untuk mereka, dan bukan buat Umar dan keluarga Umar. Bagikanlah kepada mereka."⁵⁰

Ketika pada akhir kematiannya, Umar menunjuk enam orang tokoh sahabat sebagai calon penggantinya.. Keenam tokoh yang di tunjuk itu tidak ada satupun kerabat dari Umar. Bahkan Umar berwasiat agar anaknya Abdullah bin Umar hanya

⁴⁷ *Ibid.*, 665.

⁴⁸ Musthafa Murad, *'Umar ibn Khattab...*, 188.

⁴⁹ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab...*, 676.

⁵⁰ *Ibid.*, 680.

boleh menjadi saksi diantara mereka dan tidak mempunyai hak untuk maju menjadi khalifah.⁵¹

Dari kisah-kisah diatas tergambar salah satu faktor keberhasilan Umar dalam memimpin Daulah Islamiyah pada waktu itu adalah sikap kesederhanaannya dan sangat anti kepada kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepribadiannya yang kuat dan kekuasaannya yang besar tidak membuat ia tamak dan serakah.

3. Urgensi Etika Politik Umar Ibn Khattab Dalam Tata Politik Masa Kini

Kekerasan, politik uang dan korupsi merupakan persoalan yang senantiasa melekat dalam setiap praktek kekuasaan. Ketiga kejahatan itu semakin menyadarkan urgensi penerapan etika politik. Karena tujuan etika politik adalah untuk mengarahkan kehidup baik, bersama dan orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.⁵²

Selain karena etika mempunyai tujuan yang baik. secara khusus menurut Geoff Mulgan, bahwa etika juga mempunyai peranan yang sangat signifikan. Karena etika akan mampu mengeliminir konflik atau gejolak yang mengemuka diberbagai dimensi kehidupan umat manusia.⁵³

Dari tujuan yang baik itulah makanya para ilmuan menempatkan etika menjadi nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh banggunya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana etikanya. Apabila etikanya baik, sejahteralah lahir batinnya; bila etikanya rusak, rusaklah lahir dan batinnya.⁵⁴

Maka itu pengamalan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena etika tidak semata menjadi acuan kepastian bagi setiap pengambilan keputusan publik, tetapi juga merupakan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁵ Dan begitu juga sebaliknya, menurut Azyumardi Azra, etika politik sulit terwujud tanpa demokrasi.⁵⁶

Jadi adanya berbagai gejala kemerosotan etika politik, atau bahkan etika publik pada umumnya tidak hanya sangat memprihatinkan, tetapi juga kontradiktif dengan

⁵¹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafah*, 168.

⁵² Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, 204.

⁵³ Geoff Mulgan, *Politik dalam Sebuah Era Anti Politik* (Jakarta: YOI, 1995).

⁵⁴ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 1-2

⁵⁵ Faisal Baasir, *Etika Politik, Pandangan. ...*, 2.

⁵⁶ *Ibid.*, xiii-xiv.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

demokrasi yang sedang tumbuh; karena pada dasarnya tidak ada demokrasi tanpa etika politik. Tanpa etika politik yang terjadi hanyalah distorsi-distorsi dalam pertumbuhan demokrasi.⁵⁷

Dalam konteks etika politik Umar Ibn Khattab menjadi hal yang sangat sangat Urgen karena Umar menjadikan nilai-nilai agama (Islam) sebagai pondasi dalam membangun dan menata masyarakat dan negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Saint Hilaire. Dimana menurut Saint Hilaire Saint, mewujutkan suatu sistem etika dalam masyarakat harus dilandasi oleh suatu kepercayaan (agama). Karena tanpa dilandasi oleh kepercayaan (agama) maka sistem etika itu akan sulit untuk diwujutkan. Pasalnya, Kepercayaan (agama) adalah modal bagi ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.⁵⁸

Sejalan dengan pemikiran itu secara spesifik Umar yang sangat kuat dalam memegang agama (Islam) sebagai rujukan dalam berpolitik, seorang pemikir Islam Dr. Muhammad Iqbal (1873-1938) mengatakan bahwa: Hukum Islam dapat berkembang di negeri-negeri Islam asalkan dunia Islam mau memasuki dengan jiwa Umar. Karena baginya, Umar adalah orang yang yang pertama dalam Islam yang berfikiran bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidup Nabi dengan keberanian moral mengucapkan kata-kata cemerlang: "Kitab Allah sudah cukup bagi kita."⁵⁹

Semangat Umar dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan semangat jiwa yang tinggi akan kedalaman ilmu dan ketaatan keislaman Umar. Hal ini jugalah mengapa Abbas Mahmoud Al-Aqqad berpendapat bahwa: Sosok Umar adalah orang yang cocok dengan masa kita sekarang, karena masa sekarang adalah masa yang berkembang padanya pemujaan kekuatan yang semena-mena dan mereka yang mendukungnya mendakwakan, bahwa kekerasan dan kebenaran adalah dua hal yang bertentangan. Bila kita memahami seseorang seorang besar seperti Umar Ibn Khattab, maka sesungguhnya kita telah menghancurkan sistem kekuatan semena-mena dari akar-akarnya. Karena kita akan menemui seorang laki-laki yang sekaligus berada pada puncak kekerasan, puncak keadilan dan puncak kasih sayang. Dan dalam

⁵⁷ *Ibid.*, xiii-xiv.

⁵⁸ Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika: Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam* (Jakarta: Serambi, 2001), 29.

⁵⁹ Sir Muhammad Iqbal, *The Rekonstruksi of Religious Thought in Islam*, Tejemahan Ali Audah dkk (Jakarta: Tinta Mas, 1996), 158

pemahaman ini terdapat obat bagi penyakit masa kini, yang mampu menyembuhkan orang yang dapat diharapkan kesembuhannya.⁶⁰

Selain itu pula, menurut Azyumardi Azra, proses politik dalam sistem demokrasi tidak hanya mengharuskan adanya aturan sebagai rujukan kolektif, tetapi juga ketundukan untuk mematuhi. Aturan seharusnya bukan sekedar rangkaian prosedur, tapi kultur (nilai atau norma) yang distrukturkan.⁶¹ Sebagai mana Umar menerapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber rujukan yang mengkultur dalam masyarakat Arab pada waktu itu.

Disinilah juga akan kita lihat dan rasakan betapa pentingnya keberadaan norma dan hukum dalam pembentukan etika. Sebagai mana yang disebut oleh Faisal Baasir, keberadaan norma dan hukum mempunyai peranan besar dalam pembentukan etika.⁶² Norma-norma etika itu baru bisa terlaksana apabila ia terintegral menjadi hukum yang harus dipatuhi dan sangksi-sangksi bagi yang melanggarnya.

Berangkat dari realitas politik yang ada serta landasan konsepsi etika politik. semangat Umar Ibn Khattab dalam membangun dan mengatur umat Islam menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana Umar betul-betul ingin menerapkan ajaran Islam dengan tegas tanpa pandang bulu. Namaun tidak ada kekakuan Umar dalam pengertian terkandung kebijakannya sendiri sering lepas dari tradisi keislaman yang dibangun oleh para pendahulunya (Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar).

Dalam penegakan hukum misalnya. jiwa yang bersih, jujur dan berani bersikap tegas, prinsip yang dipegang kuat oleh Umar. Sebagaimana Umar yang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum walau kadang hukum itu menyerempet pada dirinya sendiri dan keluarganya.

Begitu juga budaya politik. Meskipun politik hal yang baru berkembang dalam masyarakat Islam, namun melekat dalam jiwa masyarakat Islam karena Umar menjadikan dirinya bagian dari budaya politik yang baik itu. Walau kadang kebijakan itu merugikan dirinya sendiri.

Keteladanan seorang pemimpin juga merupakan hal yang sangat penting dalam tegaknya nilai-nilai etika dalam bernegara. Keteladanan itu pula yang tidak tercermin pada diri para pemimpin politik masa kini. Apalagi budaya pengkultusan dan pengidolaan pada sosok individu masih sangat kental.

⁶⁰ Abbas Mahmoud al-Aqqad, *Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 11.

⁶¹ A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik...*, IV.

⁶² Faisal Baasir, *Etika Politik...*, 36.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

Sebagaimana Umar yang sangat disegani dan di takuti oleh rakyat dan bawahannya bukan sekedar karena Umar pemimpin yang sangat keras, tetapi ia sering menjadikan dirinya bagian dari setiap perasaan dan penderitaan rakyatnya. Ia rela berlapar ketika rakyatnya pun dalam kelaparan. Selain itu ketegasan dalam mengambil sikap dan keputusan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi terciptanya proses etika yang baik. Terutama ketegasan dan keadilan dalam penerapan hukum.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; (i) Pola politik Umar secara teoritis tidak terlepas mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai rujukan utama. Dan secara praktis keberadaan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul dan Abu Bakar Ash-Shidiq adalah contoh dan keteladanan Umar dalam melakukan setiap sikap dan perbuatannya, terutama dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Meskipun demikian, keteguhan dalam menjalankan syaria'at dan keteladanan yang kuat dari kedua tokoh tersebut tidak mengekang kebijakan politik Umar dalam berinovasi. Artinya fleksibilitas Umar dalam menetapkan kebijakan yang selalu menyesuaikan keadaan tetapi tidak menyimpang koridor syari'at. Artinya Pola politik Umar adalah pola lokal yang berorientasi global, (ii) Keadilan, Demokrasi (*Syura*) dan Kesederhanaan yang menentang sikap Koruptif, Kolusi dan nepotisme menjadi ciri khas yang menonjol dalam perpolitikan Umar Ibn Khattab.(iii) Keberhasilan politik Umar bukan saja diakui oleh kalangan Islam tetapi juga diluar Islam. Keberhasilan itu tidak terlepas oleh semangat umat Islam untuk menegakkan ajaran agamanya pada waktu itu masih sangat tinggi. Kemudian sosok Umar yang sangat cerdas dan menguasai keilmuan Islam, seperti fiqh dan hukum syari'at. Sehingga mempermudah ia dalam menentukan kebijakan. Selain juga karena paktor keilmuan, juga karena pengalaman Umar baik sebelum masuk Islam Umar sudah berpengalaman didalam memimpin umat dan menjalankan tugas sebagai *sifarah* (penengah) antara masyarakat Quraisy dengan kabilah-kabilah lainnya. Sesudah masuk Islam pengalaman selalu mendampingi Rasulullah, memperhatikan semua wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, sangat memahami sunah dan segala keputusannya. Di samping itu ia mempunyai firasat yang tepat dan kuat mengenai orang-orang yang dihadapinya, dan dari tingkah laku mereka ia mampu menilai kemampuan mereka sesuai dengan apa

KEMAS ABDUL HAI

yang dilihatnya. Dengan pengalaman itulah Umar dapat banyak belajar dalam menjalani perpolitikan Islam pada masa kepemimpinannya. (iv) Dari pemaparan etika politik Umar Ibn khattab tersebut maka urgensinya menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diterapkan dalam kehidupan politik dimanapun dan bagaimanapun bentuk Negara tersebut. Karena era politik masa kini menunjukkan banyak sekali kekacauan. Dan Etika politik Umar sangat cocok untuk di adopsi baik sistimnya maupun nilai-nilainya. Karena nilai etika politik Umar bersifat universal. Trutama sekali Kontekstual etika politik Umar itu lebih terasa bernilai ketika diterapkan dalam konteks politik Indonesia yang wilyahnya sangat luas, penduduknya banyak dengan pruralitas budaya, suku dan agama. Dimana Islam sebagai keyakinan mayoritas yang dianut menjadi sangat berkepentingan syiarnya agama Islam dengan baik dan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Karena realita politik di Indonesia sangat lemah dari nilai-nilai etika. Kerena lemahnya keteladanan dari para politikus dan pejabat negara dan lemahnya penegakan hukum serta juga budaya etika yang belum meresap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ahmad Haris. *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ahmad Mahmud Subhi. *Filsafat Etika: Tanggaban Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam*. Jakarata: Serambi, 2001.
- Ahmad Subhi. Mahmud. *Filsafat Etika: Tanggaban Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifah, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj, KH Farid Ma'ruf, Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Amiur Nuruddin. *Ijtihad Umar Ibn Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. I. Jakarta: Rajawali, 1991.
- As-Suyuthi. *Tarikh al-Khulafah*, (ter) Fachry, Cet. I. Jakarta: Mizan Republik, 2010.
- At-Tabari. *Tarikh At-Thabari*, Jilid III. Mesir: Darul Ma'arif, 1962.
- Bakir Ihsan. *Etika Dan Logika Berpolitik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Bertens. K. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Clymer Rodee Carlton, (ed). *Introduction to political science*. (Ter) *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Compton, R Boyd. *Kemelut Demokrasi Liberal*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Didin Saefuddin Buchori. *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009.
- Geoff Mulgan. *Politik dalam Sebuah Era Anti Politik*. Jakarta: YOI, 1995.

KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM

- Harun Nasution. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* cet.5. Jakarta: UI Press, 1985.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Cet. I. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Husain Haikal, Muhammad. *Umar bin Khattab*, (ter.) Ali Auda, dari judul asli *Al-Faruq 'Umar*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008.
- M. Amin Abdullah. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- , *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- , SJ. <http://grelovejogja.wordpress.com/2007/09/19/sekitar-etika-politik/>, 28 Januari 2010 .
- Mahmoud al-Aqqad, Abbas. *Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab*, Cet. I . Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Majeed, Mun'im. *Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah*, Mesir: Angelo, 1965.
- Mardawy, al-Hasan Basri. *Etika Politik Dalam Perpektif al-Qur'an*. Madina: Jakarta, 2008.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Miskawaih, Ibn. *Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq*. cet. I . Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1934.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-13. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian* cet. 3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad Said. *Etika Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1960.
- Murad, Musthafa. *Kisah Umar Ibn Khattab*, (ter) Ahmad Ginanjar Sya'ban dan Lulu M. Sunman, dari judul asli *'Umar ibn al-Khathth b*, Cet. I . Jakarta : Zaman, 2009.
- Samsul Munir Amin. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZA, 2009.
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*, Cet. 2. Jakarta: Rajawali, 1990.